

Dampak Penjaminan Mutu Pelatihan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Pertanian: Studi Evaluatif Model CIPP

The Impact of Training Quality Assurance on Agriculture Training Implementation: An Evaluative Study of the CIPP Model

Tedy Dirhamsyah^{a,1}, Lilian Safitri^{a,2,*}, Risweki Deflita^{a,3}, dan Andi Amal Hayat Makmur^{b,4}

^a Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian

^b Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Kementerian Pertanian

¹tedydirhamsyah@pertanian.go.id; ²liliansafitri2019@gmail.com; ³dadikrolan@gmail.com; ⁴andicaritilaif@gmail.com

* corresponding author

INFO ARTIKEL

ABSTRACT / ABSTRAK

Sejarah Artikel

Diterima:

14 Januari 2026

Direvisi:

22 Juni 2026

Terbit:

1 Juli 2026

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan penjaminan mutu pelatihan dan menganalisis dampaknya terhadap penyelenggaraan pelatihan menggunakan model CIPP yang mencakup aspek context, input, process, dan product. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi pada 10 UPT pelatihan bidang pertanian di bawah Kementerian Pertanian pada periode Oktober–Desember 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penjaminan mutu pelatihan berada pada kategori baik pada seluruh komponen CIPP. Pada aspek context, program pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan peserta serta kebijakan dan tugas fungsi lembaga. Pada aspek input, kualifikasi widyaiswara, kurikulum, bahan ajar, serta sarana dan prasarana berada pada kategori baik meskipun masih terdapat variasi antar UPT. Pada aspek process, penerapan SOP penjaminan mutu, metode pembelajaran, serta monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan secara konsisten. Pada aspek product, peningkatan kompetensi peserta, kepuasan, dan penerapan hasil pelatihan di tempat kerja menunjukkan hasil yang positif dengan nilai mutu rata-rata 70,31–90,25. Secara keseluruhan, sebagian besar UPT berada pada kategori sangat bermutu, yaitu Bapeltan Lampung, BBPP Batu, BBPP Lembang, BBPP Binuang, BBPP Kupang, BBPKH Cinagara, dan BBPP Ketindan, sedangkan Bapeltan Jambi dan beberapa UPT lainnya berada pada kategori bermutu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjaminan mutu pelatihan berkontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas, konsistensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan. Selain itu, aspek yang perlu dipertahankan meliputi penerapan SOP, kompetensi widyaiswara, dan kesesuaian program dengan kebutuhan, sedangkan aspek yang perlu ditingkatkan adalah konsistensi kualitas input serta penguatan evaluasi pascapelatihan.

This study aims to evaluate the implementation of training quality assurance and analyze its impact on training delivery using the CIPP evaluation model, which comprises context, input, process, and product components. The study employed an evaluative research approach with data collected through document analysis at ten agricultural training centers under the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia during the period October–December 2025. The results indicate that the implementation of training quality assurance is categorized as good across all CIPP components. In the context dimension, training programs are generally aligned with participant needs as well as institutional policies and functions. In the input dimension, instructor qualifications, curriculum, learning materials, and training facilities are in good condition, although variations among training centers still exist. In the process dimension, the implementation of standard operating procedures, learning methods, and monitoring and evaluation systems is consistently applied and contributes to structured training delivery. In the product dimension, improvements in participant competencies, satisfaction levels, and workplace application of training outcomes show positive results, with average quality scores ranging from 70.31 to 90.25. Overall, most training centers are classified as “very high quality,” including Lampung, Batu, Lembang, Binuang, Kupang, Cinagara, and Ketindan, while Jambi and several other centers are categorized as “high quality.” These findings demonstrate that training quality assurance contributes positively to improving the effectiveness, consistency, and accountability of training implementation. Furthermore, key aspects that should be maintained include SOP implementation, instructor competence, and program relevance to needs, while areas requiring improvement include consistency of input quality and strengthening post-training evaluation mechanisms.

This is an open access article under the CC–BY license.



Kata Kunci: CIPP, evaluasi, Penjaminan mutu, pelatihan, penyelenggaraan pelatihan bidang pertanian

Keywords: CIPP model, training, program evaluation, agriculture training implementation, training quality assurance

1. Pendahuluan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Pembangunan di berbagai sektor termasuk bidang pertanian. Pelatihan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kompetensi individu, baik aparatur, non aparatur, maupun pelaku pembangunan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja. Namun demikian, keberhasilan pelatihan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya program pelatihan tetapi sangat bergantung pada kualitas penyelenggaraannya. Dalam prakteknya, berbagai permasalahan masih dijumpai dalam penyelenggaraan pelatihan, antara lain ketidaksesuaian program dengan kebutuhan peserta, keterbatasan sumber daya pelatihan, pelaksanaan pembelajaran yang belum optimal, serta lemahnya evaluasi hasil pelatihan dan minimnya kontribusi pelatihan terhadap peningkatan kinerja peserta maupun organisasi.

Penjaminan mutu pelatihan hadir sebagai mekanisme sistematis untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian kualitas, tetapi juga sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam penyelenggaraan pelatihan. Melalui penjaminan mutu, diharapkan pelatihan yang dirancang berdasarkan kebutuhan yang nyata, didukung oleh sumber daya yang memadai, dilaksanakan secara efektif, serta menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur. Meskipun berbagai pedoman, standar, dan prosedur penjaminan mutu pelatihan telah dikembangkan, implementasinya di lapangan masih memerlukan evaluasi yang komprehensif. Evaluasi tidak hanya diperlukan untuk menilai tingkat keterlaksanaan penjaminan mutu, tetapi juga untuk mengkaji sejauh mana penjaminan mutu memberikan dampak nyata terhadap penyelenggaraan pelatihan secara keseluruhan. Meskipun berbagai penelitian mengenai pelatihan di bidang pertanian telah dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada aspek efektivitas pelatihan yang bersifat parsial, seperti tingkat kepuasan peserta, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta evaluasi hasil belajar jangka pendek. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi penjaminan mutu sebagai suatu sistem yang memengaruhi keseluruhan penyelenggaraan pelatihan masih relatif terbatas. Di sisi lain, berbagai lembaga pelatihan pertanian telah menerapkan standar, pedoman, dan prosedur penjaminan mutu, namun bukti empiris mengenai sejauh mana implementasi tersebut berdampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan belum tersedia secara memadai.

Selain itu, evaluasi pelatihan yang selama ini dilakukan umumnya belum menggunakan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Sebagian besar evaluasi hanya berorientasi pada hasil akhir (*output*) tanpa mempertimbangkan keterkaitan antara kebutuhan pelatihan, ketersediaan sumber daya, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Padahal, keberhasilan penyelenggaraan pelatihan dipengaruhi oleh interaksi berbagai komponen yang saling terkait. Keterbatasan tersebut menyebabkan informasi yang dihasilkan belum mampu memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas penjaminan mutu maupun menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara harapan normatif bahwa penjaminan mutu mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan dengan ketersediaan bukti empiris yang menjelaskan dampaknya secara menyeluruh dalam konteks pelatihan bidang pertanian. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menggunakan pendekatan evaluatif yang komprehensif untuk menganalisis dampak penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan pelatihan. Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dipandang relevan untuk mengisi kesenjangan tersebut karena mampu mengevaluasi keterkaitan antara konteks kebutuhan pelatihan, sumber daya yang tersedia, proses pelaksanaan, serta hasil yang dicapai, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat bagi penguatan sistem penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pelatihan bidang pertanian secara berkelanjutan.

Metode evaluasi CIPP (*context, input, process, product*) dipandang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu mengevaluasi program secara menyeluruh, mulai dari kesesuaian konteks dan kebutuhan (*context*), kesiapan sumber data (*input*), kualitas pelaksanaan (*process*), hingga capaian hasil pelatihan (*product*). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dampak penjaminan mutu pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum tersedianya gambaran empiris yang komprehensif mengenai dampak penjaminan mutu pelatihan pada seluruh tahapan program. Tujuan dari penelitian ini adalah (a) mengevaluasi penerapan penjaminan mutu pelatihan berdasarkan aspek CIPP, (b) menganalisis dampak penjaminan mutu pelatihan terhadap kualitas penyelenggaraan pelatihan, dan (c) mengidentifikasi aspek penjaminan mutu yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelatihan.

2. Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember 2025. Kegiatan penelitian meliputi pengumpulan data, observasi, serta klarifikasi hasil temuan terkait penyelenggaraan pelatihan pada Unit Pelaksana

Teknis (UPT) pelatihan bidang pertanian di bawah Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian. Lokasi penelitian mencakup beberapa UPT pelatihan bidang pertanian, yaitu Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, BBPP Lembang, BBPP Binuang, BBPP Batangkaluku, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, BBPP Batu, Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi, Balai Besar Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan (BBPPKH) Cinagara, serta Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi dan Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai implementasi penjaminan mutu pelatihan dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pelatihan bidang pertanian. Penelitian menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat penerapan penjaminan mutu pelatihan serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pelatihan. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk memperdalam pemahaman terhadap temuan kuantitatif dan menggali konteks implementasi penjaminan mutu di lapangan secara lebih komprehensif. Evaluasi dalam penelitian ini menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keterlaksanaan penjaminan mutu dan dampaknya terhadap kualitas penyelenggaraan pelatihan bidang pertanian.

Subjek penelitian ini meliputi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pelatihan pada 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelatihan bidang pertanian di bawah Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, yaitu: (1) pengelola atau penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan, (2) widyaiswara atau fasilitator, dan (3) peserta pelatihan. Objek penelitian meliputi: (1) penjaminan mutu pelatihan yang mencakup kebijakan, standar, prosedur, pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi mutu pelatihan; dan (2) penyelenggaraan pelatihan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan. Populasi penelitian adalah seluruh pengelola pelatihan, widyaiswara/fasilitator, dan peserta pelatihan yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan pada 10 UPT pelatihan bidang pertanian selama tahun 2025, yaitu BBPP Ketindan, BBPP Lembang, BBPP Binuang, BBPP Batangkaluku, BBPP Kupang, BBPP Batu, BBPMKP Ciawi, BBPPKH Cinagara, Bapeltan Jambi, dan Bapeltan Lampung. Jumlah populasi yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak 50 orang yang terdiri atas pengelola pelatihan, widyaiswara/fasilitator, dan peserta pelatihan. Mengingat jumlah populasi relatif kecil dan seluruh anggota populasi dapat dijangkau, penelitian ini menggunakan teknik total sampling atau sensus, sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai responden penelitian.

Distribusi responden dilakukan secara proporsional pada masing-masing UPT pelatihan dengan mempertimbangkan keterwakilan setiap kelompok responden. Sebagai contoh, setiap UPT diwakili oleh lima responden yang terdiri atas satu orang pengelola atau penanggung jawab pelatihan, satu orang koordinator atau pelaksana penjaminan mutu, satu orang widyaiswara/fasilitator, dan dua orang peserta pelatihan.

Adapun kriteria responden penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengelola pelatihan, yaitu pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, atau penjaminan mutu pelatihan.
2. Widyaiswara/fasilitator, yaitu tenaga pengajar yang telah terlibat dalam pelaksanaan sekurang-kurangnya satu program pelatihan pada tahun 2025.
3. Peserta pelatihan, yaitu individu yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan pada salah satu dari 10 UPT pelatihan bidang pertanian selama periode penelitian.

Selain responden kuantitatif, penelitian ini juga melibatkan informan kunci pada tahap kualitatif yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan kunci dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan, pengalaman, dan pemahaman terhadap implementasi penjaminan mutu pelatihan. Informan kunci meliputi kepala UPT, koordinator penjaminan mutu, penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan, dan widyaiswara senior. Pengumpulan data kualitatif dilakukan hingga mencapai tingkat kejenuhan data (*data saturation*), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan tema atau informasi baru yang signifikan.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan data yang telah dikumpulkan saat penilaian penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan. Adapun indikator evaluasi Model CIPP disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Evaluasi Model CIPP

NO	MODEL CIPP	INDIKATOR
1	<i>Context</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian program pelatihan dengan kebutuhan peserta b. Relevansi pelatihan dengan kebijakan dan tugas fungsi c. Dukungan kelembagaan terhadap pelatihan
2	<i>Input</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi dan kompetensi widyaiswara b. Kurikulum dan bahan ajar c. Sarana dan prasarana pelatihan d. Sistem manajemen dan pendanaan pelatihan

3	<i>Process</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembelajaran pelatihan b. Metode dan media pembelajaran c. Penerapan SOP penjaminan mutu d. Monitoring dan evaluasi pelatihan
4	<i>Product</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kompetensi peserta b. Kepuasan peserta pelatihan c. Penerapan hasil pelatihan di tempat kerja

Sumber: Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007)

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen perencanaan pelatihan, SOP penjaminan mutu, laporan evaluasi pelatihan, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan uraian sebagai berikut:

- a. Analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan tingkat penerapan penjaminan mutu dan kualitas penyelenggaraan pelatihan berdasarkan aspek CIPP;
- b. Analisis data kualitatif menggunakan Teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, temuan penting, serta konteks implementasi penjaminan mutu pelatihan; dan
- c. Integrasi data untuk memberikan gambaran evaluasi yang komprehensif mengenai dampak penjaminan mutu pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan.

3. Hasil dan Pembahasan

(a) Evaluasi penerapan penjaminan mutu pelatihan berdasarkan aspek CIPP

Sebelum implementasi penjaminan mutu, penyelenggaraan pelatihan pada UPT lingkup Pusat Pelatihan Pertanian belum memiliki mekanisme evaluasi yang terstandar dan terintegrasi. Pelaksanaan penjaminan mutu cenderung dilakukan secara parsial oleh masing-masing UPT dengan pendekatan, instrumen, dan indikator yang beragam. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya pengukuran kualitas penyelenggaraan pelatihan secara menyeluruh serta terbatasnya informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebelum pelaksanaan penjaminan mutu meliputi ketidaksesuaian antara program pelatihan dengan kebutuhan peserta, variasi kualitas kurikulum dan bahan ajar, belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan, serta belum seragamnya penerapan prosedur operasional standar dalam penyelenggaraan pelatihan. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi pascapelatihan masih berfokus pada aspek administratif dan kepuasan peserta, sehingga belum mampu menggambarkan kontribusi pelatihan terhadap peningkatan kompetensi peserta maupun kinerja organisasi.

Implementasi penjaminan mutu pada tahun 2025 merupakan pelaksanaan pertama yang dilakukan secara sistematis dan terstandar pada seluruh UPT pelatihan bidang pertanian. Penjaminan mutu dilaksanakan melalui penerapan standar mutu, penggunaan instrumen evaluasi yang seragam, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara terstruktur, serta pemberian umpan balik untuk perbaikan penyelenggaraan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh balai pelatihan memperoleh nilai di atas standar mutu minimum. Mayoritas balai berada pada kategori "Sangat Bermutu", yang mencerminkan konsistensi penerapan sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pelatihan bidang pertanian. Meskipun penelitian ini belum dapat mengukur dampak kausal melalui perbandingan sebelum dan sesudah implementasi karena penjaminan mutu baru pertama kali dilaksanakan, hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan positif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelatihan.

Dengan demikian, dampak penjaminan mutu dalam penelitian ini diinterpretasikan sebagai kontribusi awal terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan, yang ditunjukkan melalui terpenuhinya standar mutu, meningkatnya keseragaman proses penyelenggaraan, serta tersedianya informasi evaluatif yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan pada seluruh UPT pelatihan bidang pertanian. Hasil penelitian menunjukkan seluruh balai pelatihan memperoleh nilai di atas standar mutu minimum. Mayoritas balai berada pada kategori sangat bermutu, yang mencerminkan konsistensi penerapan sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pelatihan bidang pertanian, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Penilaian Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan pada Balai Pelatihan Bidang Pertanian

No	Balai Pelatihan	Nilai Mutu Rata-Rata	Kategori Mutu
1	Bapeltan Lampung	90,25	Sangat Bermutu
2	Bapeltan Jambi	70,31	Bermutu
3	BBPP Binuang	83,50	Sangat Bermutu
4	BBPP Batu	88,40	Sangat Bermutu
5	BBPP Kupang	83,10	Sangat Bermutu
6	BBPP Lembang	87,50	Sangat Bermutu
7	BBPKH Cinagara	87,00	Sangat Bermutu
8	BBPMKP Ciawi	78,18	Bermutu
9	BBPP Ketindan	83,60	Sangat Bermutu
10	BBPP Batangkaluku	69,70	Bermutu

Sumber: Laporan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan UPT Lingkup Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Tahun 2025 (diolah)

(b) Analisis dampak penjaminan mutu pelatihan terhadap kualitas penyelenggaraan pelatihan

Hasil penilaian penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan pada UPT Pelatihan Bidang Pertanian menunjukkan bahwa seluruh UPT yang dievaluasi telah memenuhi standar mutu minimum yang ditetapkan. Nilai mutu rata-rata berada pada rentang 70,31 hingga 90,25 yang mengindikasikan bahwa sistem penjaminan mutu telah diimplementasikan secara konsisten pada berbagai unit pelaksana pelatihan (seperti yang disajikan pada Tabel 2). Balai Pelatihan Lampung memperoleh nilai mutu tertinggi sebesar 90,25, diikuti oleh BBPP Batu (88,40) dan BBPP Lembang (87,50), yang seluruhnya masuk dalam kategori sangat bermutu. Capaian tersebut mencerminkan kesiapan konteks program pelatihan, ketersediaan sumber daya pelatihan yang memadai, serta konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur penjaminan mutu selama proses penyelenggaraan pelatihan. Tingginya nilai mutu pada UPT tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan telah berjalan secara optimal. UPT pelatihan lainnya, seperti BBPP Binuang (83,50) dan BBPP Kupang (83,10), juga berada pada kategori sangat bermutu, yang menegaskan bahwa kualitas penyelenggaraan pelatihan tidak hanya terkonsentrasi pada satu atau dua balai tertentu, tetapi relatif merata pada sebagian besar UPT yang dievaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu telah berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu yang efektif pada level institusi. Penilaian BBPPKH Cinagara (87,00) dan BBPP Ketindan (83,60) juga berada pada kategori sangat bermutu.

Sementara itu, Bapeltan Jambi (70,31) dan kelompok balai pelatihan lainnya (73,94) berada pada kategori bermutu. Meskipun nilai ini masih berada di atas standar minimum, capaian tersebut mengindikasikan perlunya penguatan pada aspek tertentu, seperti peningkatan kualitas input pelatihan atau optimalisasi proses pembelajaran. Temuan ini penting sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam kerangka penjaminan mutu pelatihan. Secara keseluruhan, hasil pada Tabel 2 menegaskan bahwa penerapan penjaminan mutu pelatihan memberikan dampak positif terhadap kualitas penyelenggaraan pelatihan. Dominasi kategori sangat bermutu menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan. Dengan demikian, penguatan penjaminan mutu perlu terus dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas pelatihan dapat dipertahankan dan ditingkatkan di seluruh balai pelatihan bidang pertanian. Variasi nilai mutu antarpelatihan mencerminkan perbedaan kompleksitas program, karakteristik peserta, serta kesiapan sumber daya pada masing-masing UPT.

Secara umum, hasil ini menegaskan bahwa sistem penjaminan mutu telah mampu berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian mutu penyelenggaraan pelatihan di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian. Distribusi kategori mutu penyelenggaraan pelatihan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Kategori Mutu Penyelenggaraan Pelatihan

Kategori Mutu	Jumlah Balai	Interpretasi
Sangat Bermutu	7	Mutu pelatihan sangat baik dan konsisten
Bermutu	3	Memenuhi standar mutu minimum
Tidak Bermutu	0	Tidak ditemukan

Sumber: Petunjuk Teknis Nomor: 168/Kprs/SV.L20/r/09/2025 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan.

(c) Indentifikasi aspek penjaminan mutu yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelatihan

Dari aspek *context*, hasil penilaian menunjukkan bahwa program pelatihan yang dievaluasi telah disusun berdasarkan kebutuhan organisasi dan peserta. Hal ini tercermin dari kesesuaian tema pelatihan dengan tugas dan fungsi peserta, seperti pelatihan penyuluh pertanian ahli, pelatihan teknis budidaya, serta pelatihan yang mendukung program strategis nasional seperti brigade pangan dan pengembangan perkebunan. Dukungan kebijakan kelembagaan, pedoman penyelenggaraan pelatihan, serta komitmen pimpinan UPT menjadi faktor penting yang memperkuat relevansi dan legitimasi program pelatihan. Penelitian ini menunjukkan bahwa aspek konteks telah mendukung keberhasilan implementasi penjaminan mutu secara menyeluruh.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa program pelatihan yang dievaluasi telah disusun berdasarkan kebutuhan organisasi dan peserta. Hal ini tercermin dari kesesuaian tema pelatihan dengan tugas dan fungsi peserta, seperti pelatihan penyuluh pertanian ahli, pelatihan teknis budidaya, serta pelatihan yang mendukung program strategis nasional seperti brigade pangan dan pengembangan perkebunan. Penyesuaian tema pelatihan dengan kebutuhan peserta ini sejalan dengan prinsip *needs assessment* dalam evaluasi program, di mana relevansi pelatihan menjadi faktor penting untuk efektivitas pembelajaran (Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Galloway & Meek, 2004).

Dukungan kebijakan kelembagaan, pedoman penyelenggaraan pelatihan, serta komitmen pimpinan UPT juga menjadi faktor penting yang memperkuat legitimasi dan keberhasilan program pelatihan. Menurut Kementerian Pertanian RI (2018), keberhasilan penyelenggaraan pelatihan di UPT Pelatihan sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan, ketersediaan pedoman operasional, serta kepemimpinan yang konsisten dalam mengimplementasikan standar penjaminan mutu. Hal ini sejalan dengan temuan Wibowo & Santoso (2021), yang menekankan bahwa konteks organisasi, termasuk dukungan pimpinan dan kebijakan, merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu pelatihan. Berdasarkan literatur dan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa aspek konteks telah mendukung keberhasilan implementasi penjaminan mutu secara menyeluruh. Penyesuaian program pelatihan dengan kebutuhan peserta, didukung oleh kebijakan kelembagaan dan kepemimpinan yang komitmen, memastikan relevansi, legitimasi, dan keberlanjutan pelatihan pertanian (Stufflebeam, 2003).

Evaluasi terhadap aspek *input* menunjukkan bahwa sebagian besar UPT pelatihan memiliki kesiapan sumber daya yang memadai. Widyaiswara dan fasilitator dinilai memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pelatihan, didukung oleh kurikulum dan modul yang relevan dengan kebutuhan peserta serta perkembangan sektor pertanian. Sarana dan prasarana pelatihan pada umumnya berada dalam kondisi layak dan mendukung pelaksanaan pembelajaran, baik untuk pelatihan tatap muka maupun *blended learning*. Nilai mutu yang tinggi pada beberapa UPT pelatihan mengindikasikan bahwa kesiapan input merupakan faktor kunci dalam pencapaian kategori *sangat bermutu*. Namun demikian, hasil penilaian juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas input masih diperlukan secara berkelanjutan, khususnya dalam pembaruan materi dan penguatan kompetensi widyaiswara dan fasilitator sesuai dengan perkembangan teknologi pertanian.

Evaluasi terhadap aspek input menunjukkan sebagian besar UPT pelatihan memiliki kesiapan sumber daya yang memadai. Widyaiswara dan fasilitator dinilai memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pelatihan, didukung oleh kurikulum dan modul yang relevan dengan kebutuhan peserta serta perkembangan sektor pertanian. Temuan ini sejalan dengan prinsip evaluasi input dalam model CIPP, di mana kualitas sumber daya manusia, materi pelatihan, serta fasilitas menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program (Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Stufflebeam, 2003). Sarana dan prasarana pelatihan, baik untuk pelatihan tatap muka maupun *blended learning*, umumnya berada dalam kondisi layak dan mendukung proses pembelajaran. Menurut Wibowo & Santoso (2021), kesiapan fasilitas, perangkat pembelajaran, dan dukungan teknologi merupakan aspek penting yang menentukan mutu penyelenggaraan pelatihan. Tingginya nilai mutu pada beberapa UPT pelatihan menunjukkan bahwa kesiapan input berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kategori sangat bermutu, sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa input yang memadai adalah prasyarat bagi efektivitas pelatihan (Galloway & Meek, 2004).

Meskipun demikian, hasil penilaian menunjukkan perlunya peningkatan kualitas input secara berkelanjutan, khususnya dalam pembaruan materi dan penguatan kompetensi widyaiswara dan fasilitator sesuai dengan perkembangan teknologi pertanian. Hal ini didukung oleh temuan Hord & Sommers (2008), yang menekankan pentingnya *continuous professional development* bagi pelatih untuk menjamin relevansi materi, metodologi, dan pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, penguatan aspek input menjadi strategi penting untuk mempertahankan mutu pelatihan serta mendorong inovasi dalam metode dan materi pembelajaran.

Pada aspek *process*, penerapan standar operasional prosedur (SOP) penjaminan mutu dinilai berjalan secara konsisten. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, meliputi pengelolaan kelas, penggunaan metode pembelajaran yang variatif, serta pelaksanaan evaluasi selama dan setelah pelatihan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara sistematis memungkinkan pengelola pelatihan untuk mengidentifikasi kendala selama proses pembelajaran serta melakukan perbaikan secara langsung. Tingginya nilai mutu pada berbagai pelatihan menunjukkan bahwa pengendalian mutu pada tahap proses berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pelatihan.

Pada aspek *process*, penerapan standar operasional prosedur (SOP) penjaminan mutu dinilai berjalan secara konsisten. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, mencakup pengelolaan kelas, penggunaan metode pembelajaran yang variatif, serta pelaksanaan evaluasi selama dan setelah pelatihan. Temuan ini sesuai dengan prinsip evaluasi proses dalam Model CIPP, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur, manajemen pembelajaran yang efektif, dan penerapan metode yang sesuai untuk mencapai tujuan pelatihan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Stufflebeam, 2003).

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara sistematis memungkinkan pengelola pelatihan untuk mengidentifikasi kendala selama proses pembelajaran dan melakukan perbaikan secara langsung. Hal ini sejalan dengan temuan Guskey (2000), yang menekankan bahwa evaluasi formatif dan monitoring yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan efektivitas program pelatihan dan mendukung peningkatan kualitas secara real-time. Tingginya nilai mutu pada berbagai pelatihan menunjukkan bahwa pengendalian mutu pada tahap proses berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pelatihan, mendukung literatur yang menegaskan bahwa manajemen proses yang baik merupakan kunci pencapaian hasil pelatihan yang optimal (Kementerian Pertanian RI, 2018; Wibowo & Santoso, 2021). Dengan demikian, penguatan aspek *process* melalui penerapan SOP yang konsisten, penggunaan metode pembelajaran inovatif, dan monitoring berkelanjutan menjadi strategi penting dalam menjamin mutu dan efektivitas pelatihan.

Dari sisi *product*, hasil pelatihan menunjukkan capaian yang positif, ditandai dengan tingginya tingkat kepuasan peserta serta peningkatan kompetensi setelah mengikuti pelatihan. Kategori mutu *bermutu* dan *sangat bermutu* mencerminkan bahwa pelatihan tidak hanya terlaksana sesuai standar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peserta. Beberapa pelatihan yang memperoleh nilai sangat tinggi menunjukkan bahwa hasil pelatihan telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi standar mutu, khususnya pada pelatihan yang memiliki kurikulum terstruktur, instruktur berpengalaman, dan dukungan fasilitas yang memadai. Dari sisi *product*, hasil pelatihan menunjukkan capaian yang positif, ditandai dengan tingginya tingkat kepuasan peserta serta peningkatan kompetensi setelah mengikuti pelatihan. Temuan ini sejalan dengan prinsip evaluasi produk dalam model CIPP, yang menekankan pentingnya pengukuran hasil akhir sebagai indikator keberhasilan program pelatihan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Stufflebeam, 2003).

Kategori mutu *bermutu* dan *sangat bermutu* mencerminkan bahwa pelatihan tidak hanya terlaksana sesuai standar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peserta. Beberapa pelatihan yang memperoleh nilai sangat tinggi menunjukkan bahwa hasil pelatihan telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi standar mutu, khususnya pada pelatihan yang memiliki kurikulum terstruktur, instruktur berpengalaman, dan dukungan fasilitas yang memadai. Hal ini sesuai dengan temuan Guskey (2000) dan Wibowo & Santoso (2021), yang menekankan bahwa keberhasilan pelatihan diukur dari kemampuan peserta menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, serta kepuasan peserta sebagai indikator penting efektivitas program.

Selain itu, literatur menyatakan bahwa hasil pelatihan yang optimal membutuhkan integrasi antara input yang memadai, pelaksanaan proses yang konsisten, dan evaluasi berkelanjutan, sehingga pelatihan tidak hanya memenuhi standar formal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kompetensi peserta dan organisasi (Kementerian Pertanian RI, 2018; Galloway & Meek, 2004). Dengan demikian, aspek *product* menjadi indikator akhir yang penting dalam menilai keberhasilan sistem penjaminan mutu pelatihan.

Evaluasi menggunakan model CIPP menegaskan bahwa penjaminan mutu pelatihan berperan strategis dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelatihan pertanian. Integrasi antara konteks yang relevan, input yang memadai, proses yang konsisten, dan hasil yang positif menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu dapat mendukung inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelatihan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelatihan pertanian. Penerapan penjaminan mutu yang konsisten mampu memastikan keterpaduan antara konteks, input, proses, dan hasil pelatihan. Meskipun

demikian, keberlanjutan sistem penjaminan mutu memerlukan penguatan pada aspek tindak lanjut hasil evaluasi, pembaruan materi pelatihan, serta peningkatan kapasitas instruktur dan pengelola pelatihan. Dengan penguatan tersebut, sistem penjaminan mutu diharapkan tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap standar, tetapi juga mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelatihan pertanian.

4. Kesimpulan & Rekomendasi

Penelitian ini menegaskan bahwa penjaminan mutu pelatihan memiliki dampak positif terhadap efektivitas penyelenggaraan pelatihan di balai pelatihan bidang pertanian. Evaluasi menggunakan model CIPP menunjukkan bahwa konteks, input, proses, dan hasil pelatihan secara keseluruhan berada pada kategori bermutu hingga sangat bermutu, mencerminkan kesesuaian program dengan kebutuhan peserta, kesiapan sumber daya, konsistensi pelaksanaan, dan pencapaian kompetensi peserta. Penguatan sistem penjaminan mutu melalui tindak lanjut evaluasi, pembaruan materi, dan peningkatan kapasitas instruktur diharapkan dapat mendorong inovasi serta perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelatihan pertanian.

4.2. Rekomendasi

Penguatan sistem penjaminan mutu secara konsisten, disertai pembaruan kurikulum dan materi pelatihan yang responsif terhadap perkembangan sektor pertanian, sangat diperlukan untuk menjaga efektivitas dan relevansi penyelenggaraan pelatihan. Selain itu, mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi harus diperkuat untuk mendukung inovasi, perbaikan berkelanjutan, dan peningkatan akuntabilitas program pelatihan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Balai, penyelenggara pelatihan, dan tim penjamin mutu pelatihan atas dukungan, kerja sama, dan akses informasi yang diberikan, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan secara komprehensif dan memberikan temuan yang bermanfaat.

Daftar Referensi

- Arifin, Z., & Pratama, R. (2023). Evaluation of training effectiveness in agricultural extension programs using CIPP model. *Journal of Agricultural Extension and Development*, 15(2), 101–112.
- Darmawan, A., & Lestari, S. (2022). Implementation of quality assurance system in government training institutions: An evaluative study. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 55–70.
- Galloway, F., & Meek, V. L. (2004). Contextual factors influencing training effectiveness. *Journal of Workplace Learning*, 16(4), 217–224.
- Greenhaw, L., & Biderman, R. (2025). Evaluating an Agriculture and Natural Resources Leadership Development Program Utilizing the CIPP Model. *Advancements in Agricultural Development*, 6(3).
- Guskey, T. R. (2000). *Evaluating professional development*. Corwin Press.
- Hidayat, T., & Nugroho, A. (2024). Training quality assurance and its impact on human resource competency development in the public sector. *Journal of Public Sector Innovation*, 9(1), 33–47.
- Hord, S. M., & Sommers, W. A. (2008). *Taking charge of change*. ASCD.
- Irawati, E., & Suwarno, Y. (2020). Efektifkah Pelaksanaan Penjaminan Mutu melalui Akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah di Indonesia? *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 291–312.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2018). *Pedoman umum penyelenggaraan pelatihan pertanian di UIPT Balai Pelatihan*. Kementerian Pertanian.
- Kifta, D. A., Ambiyar, A., Rizal, F., & Islami, S. (2022). Evaluation of ISO 9001 lead auditor training program using CIPP model at ATS training centre. *Jurnal Pendidikan Teknologi Kejuruan*, 5(2), 41–46. <https://doi.org/10.24036/jptk.v5i2.27323>.
- Kurniawan, B., & Santoso, E. (2021). Evaluating training programs using the CIPP model in vocational education institutions. *Journal of Vocational Education Research*, 12(3), 210–223.
- Mardiana, R., & Suryani, N. (2025). Continuous improvement in training quality assurance system: Evidence from public training centers. *International Journal of Training and Development Studies*, 7(1), 1–15.
- Nugraha, D., & Wulandari, F. (2022). The role of training evaluation in improving agricultural extension performance. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 17(2), 89–102.
- Prasetyo, Y., & Firmansyah, R. (2023). Effectiveness of competency-based training in agricultural human resource development. *Journal of Agricultural Human Resource Development*, 10(2), 77–90.
- Setiawan, H., & Putri, A. (2024). Digital transformation and training quality assurance in government training institutions. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pelatihan*, 11(1), 25–39.
- Siregar, M., & Hasanah, L. (2021). Evaluation of government training programs using the CIPP model

- approach. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 14(1), 44–58.
- Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP model for evaluation. In T. Kellaghan & D. L. Stufflebeam (Eds.), *International handbook of educational evaluation* (pp. 31–62). Springer.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation theory, models, and applications* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Suharno, S., Pardiman, P., Hariyanto, D., & Ashar, A. (2022). Monitoring Strategy and Evaluation of Education and Training Program with The CIPP Method. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(3), 1228-1241. <https://doi.org/10.31538/nzh.v5i3.2566>
- Suwardi dan Erlangga, J. (2021). Evaluation of The Implementation of The Internal Quality Assurance System Using the Cipp Evaluation Model. *International Journal of Education & Curriculum Application*. Vol. 4, No. 3, December 2021. 256-263 hal.
- Tunsiah (ed.). (2021). Kualitas Pelatihan melalui Peningkatan Mutu Pembelajaran. *Jurnal AgriWidya*, 2(3).
- Wibowo, A., & Santoso, D. (2021). Penjaminan mutu pelatihan di sektor pertanian: Studi evaluatif berbasis CIPP. *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Pertanian*, 6(2), 45–58.
- Wijaya, I., & Kurniasih, D. (2025). Strengthening training governance through quality assurance systems in public sector institutions. *International Journal of Public Administration and Policy Research*, 6(1), 12–28.
- Yulianto, G. (2007). Evaluasi Program Pelatihan Bagi Penyuluh Pertanian di BPP Kabupaten Gunungkidul (Evaluate the Training Programmes for Agricultural Extension Agents in BPP of Gunungkidul Regency). *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 3(1), 48–60.